

**PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN
SEHAT: STUDI PADA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ROKOK BERBASIS NILAI KEAGAMAAN**

Nur Aini¹, Riska Tezara Go²

Departemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan
Bisnis Ahmad Dahlan¹

Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
IPB University

email koresponden: aini.nur1969@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan iklim global dan permasalahan kesehatan akibat paparan asap rokok merupakan dua tantangan serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan, khususnya melalui Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim serta mendukung pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur (*literature review*) dengan memanfaatkan sumber primer (Al-Qur'an, hadis, tafsir klasik) serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai keagamaan mampu memperkuat regulasi formal, membentuk norma sosial baru, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Studi kasus di pesantren (Syafitri et al., 2021) dan kampus Muhammadiyah (Nur Aini et al., 2024) membuktikan efektivitas pendekatan komunitas dalam mendorong kesadaran ekologis dan keberlanjutan program. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada diskursus akademik mengenai etika lingkungan berbasis agama, tetapi juga memberi arah praktis bagi kebijakan publik, pendidikan, dan dakwah lingkungan.

Kata kunci: perubahan perilaku, perubahan iklim, Kawasan Tanpa Rokok, nilai keagamaan

ABSTRACT

Global climate change and health problems caused by tobacco smoke exposure are two major challenges threatening environmental sustainability and human well-being. This study aims to examine how religious values, particularly through the MUI Fatwa No. 86/2023, can drive behavioral change in climate change control and support the development of smoke-free areas. The research method employed is a literature review, utilizing primary sources (Qur'an, Hadith, classical tafsir) and secondary sources such as books, journals, and policy reports. The findings indicate that the integration of religious values strengthens formal regulations, builds new social norms, and increases community participation. Case studies in Islamic boarding schools (Syafitri et al.,

2021) and Muhammadiyah campuses (Nur Aini et al., 2024) demonstrate the effectiveness of community-based approaches in fostering ecological awareness and program sustainability. The implications of this research contribute not only to academic discourse on religion-based environmental ethics but also provide practical directions for public policy, education, and environmental da'wah.

Keywords: behavior change, climate change, smoke-free area, religious values

PENDAHULUAN

Perubahan iklim saat ini merupakan salah satu isu global paling mendesak. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2021 menyebutkan bahwa kenaikan suhu rata-rata global mencapai lebih dari 1,1°C dibandingkan era pra-industri, dengan konsekuensi meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis. Indonesia termasuk negara yang rentan, karena secara geografis berada di wilayah rawan bencana dan memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya alam.

Selain isu perubahan iklim, Indonesia menghadapi persoalan kesehatan publik akibat konsumsi rokok. WHO (2021) melaporkan bahwa lebih dari 225.000 orang di Indonesia meninggal setiap tahun akibat penyakit terkait rokok. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga perokok pasif, termasuk anak-anak dan perempuan. Hal ini menjadikan isu Kawasan Tanpa Rokok relevan sebagai strategi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, lingkungan hidup dan kesehatan manusia merupakan amanah dari Allah. Al-Qur'an menyebutkan: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya"* (Al-Qur'an, 7:56). Ayat ini menegaskan larangan merusak keseimbangan alam. Surah Ar-Rum (30:41) memperingatkan bahwa kerusakan darat dan laut terjadi akibat ulah manusia. Tafsir klasik seperti Al-Qurthubi (2006) menegaskan bahwa israf (berlebihan) merupakan sumber kerusakan ekologi. Hadis riwayat Bukhari-Muslim bahkan mengajarkan bahwa menanam pohon adalah sedekah, menunjukkan betapa besar nilai ekologis dalam ajaran Islam.

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim hadir sebagai panduan moral dan hukum Islam yang menekankan kewajiban umat Islam menjaga lingkungan. Fatwa ini tidak hanya menyentuh isu global, tetapi juga relevan dengan kebijakan lokal seperti pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai agama, khususnya melalui fatwa dan praktik keagamaan, dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, dinamika sosial di Indonesia memperlihatkan adanya tantangan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait lingkungan. Masih banyak perilaku konsumtif yang memicu pemborosan energi dan penggunaan plastik sekali pakai, sementara kesadaran terhadap mitigasi perubahan iklim belum merata di semua lapisan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal yang sudah ada dengan tingkat implementasi di tingkat individu dan komunitas.

Upaya pengendalian perilaku merokok melalui kebijakan Kawasan Tanpa Rokok juga kerap menghadapi hambatan budaya dan resistensi sosial. Rokok di Indonesia sering dipersepsikan sebagai bagian dari tradisi dan gaya hidup, sehingga regulasi formal saja tidak cukup untuk menekan perilaku merokok. Dalam konteks ini, nilai keagamaan berpotensi menjadi instrumen sosial yang mampu memperkuat efektivitas kebijakan publik, sebab ajaran agama lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan aturan administratif semata.

Dengan demikian, penting untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi nilai-nilai keagamaan dapat memberikan landasan moral dan spiritual bagi perubahan perilaku masyarakat. Studi ini menggabungkan isu perubahan iklim dan Kawasan Tanpa Rokok dalam kerangka etika keagamaan, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Kontribusi teoritis berupa pengembangan kajian interdisipliner yang menghubungkan teologi, kesehatan, dan lingkungan, sementara kontribusi praktisnya dapat memperkaya strategi kebijakan publik berbasis komunitas di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana

Ajzen (1991) melalui *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks lingkungan, perilaku menjaga alam tidak hanya ditentukan oleh kesadaran individu, tetapi juga norma sosial dan kontrol eksternal seperti kebijakan dan fatwa.

Lebih jauh, teori ini menekankan bahwa niat seseorang untuk berperilaku ramah lingkungan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial yang berlaku, dan keyakinan individu mengenai kemampuannya melaksanakan perilaku tersebut. Dengan demikian, kebijakan publik yang diperkuat oleh nilai agama mampu meningkatkan persepsi kontrol dan norma subjektif, sehingga mendorong niat yang lebih kuat untuk bertindak.

Selain itu, teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan keberhasilan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok maupun pengendalian perubahan iklim. Ketika masyarakat percaya bahwa perilaku menjaga lingkungan adalah hal yang positif, didukung oleh aturan sosial yang kuat, serta merasa mampu melaksanakannya, maka perubahan perilaku menjadi lebih mungkin tercapai.

Teologi Lingkungan Islam

Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar utama etika lingkungan. Surah Al-A'raf (7:31) menegaskan pentingnya hidup sederhana dan tidak berlebihan, yang relevan dengan isu pemborosan energi. Tafsir Al-Qurthubi (2006) menekankan keseimbangan alam sebagai prinsip utama. Hadis Nabi tentang menanam pohon menguatkan peran manusia sebagai khalifah yang menjaga bumi.

Dalam literatur Islam klasik, manusia dipandang sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi) yang memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap amanah Ilahi.

Selain itu, pandangan para ulama kontemporer juga menekankan bahwa krisis lingkungan merupakan akibat dari hilangnya nilai spiritual dalam pengelolaan alam. Oleh karena itu, pendekatan berbasis agama diperlukan untuk mengembalikan kesadaran ekologis, sehingga tindakan mitigasi perubahan iklim dan pengendalian konsumsi berbahaya seperti rokok memiliki legitimasi moral dan spiritual yang kuat.

Kawasan Tanpa Rokok dan Etika Kesehatan

WHO (2021) menegaskan pentingnya *Framework Convention on Tobacco Control* sebagai standar global. Di Indonesia, Fitriani et al. (2020) menemukan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di perguruan tinggi negeri menghadapi tantangan budaya, namun efektif jika didukung edukasi dan peraturan kampus. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya menekankan aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi. Dengan menekan konsumsi rokok, kebijakan ini mampu mengurangi beban kesehatan nasional sekaligus menurunkan polusi udara dalam ruang publik.

Lebih jauh, pendekatan berbasis nilai keagamaan dapat memperkuat etika kesehatan yang terkandung dalam kebijakan ini. Dalam Islam, menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan (*la dharar wa la dhirar*) menjadi prinsip hukum yang relevan, sehingga pengembangan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilihat sebagai bentuk penerapan kaidah fikih dalam kesehatan masyarakat.

Studi Kasus Indonesia

Syafitri et al. (2021) menunjukkan bahwa pesantren efektif dalam kampanye lingkungan berbasis agama. Nur Aini et al. (2024) meneliti pengembangan Kawasan Tanpa Rokok berbasis komunitas di kampus Muhammadiyah dan menemukan pendekatan kolektif yang efektif. Studi ini menegaskan pentingnya dukungan komunitas keagamaan dalam perubahan perilaku. Selain itu, penelitian Susanti & Rahman (2022) menemukan bahwa peran tokoh agama sangat menentukan dalam edukasi lingkungan, terutama dalam masyarakat pedesaan. Melalui khotbah, pengajian,

dan kegiatan sosial keagamaan, tokoh agama mampu menanamkan kesadaran ekologis yang lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan kampanye berbasis sains semata.

Kedua studi ini mengindikasikan bahwa model kampanye lingkungan dan Kawasan Tanpa Rokok berbasis komunitas keagamaan memiliki potensi besar untuk direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Dukungan institusi pendidikan Islam dan ormas keagamaan dapat mempercepat perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

Gap Penelitian

Sebagian besar studi masih memisahkan isu perubahan iklim dan Kawasan Tanpa Rokok. Padahal keduanya terkait erat dalam konteks perilaku masyarakat dan etika lingkungan. Penelitian ini mengisi celah dengan mengintegrasikan keduanya berbasis nilai keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kajian literatur (literature review)** dengan pendekatan **normatif-teologis**. Data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, dan tafsir klasik (Al-Qurthubi, 2006; Shahih Bukhari-Muslim). Data sekunder berasal dari jurnal akademik, buku, laporan WHO, Fatwa MUI No. 86/2023, dan penelitian kontemporer terkait.

Analisis dilakukan dengan teknik **tematik kualitatif**, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur terkait: perubahan perilaku, nilai keagamaan, kebijakan publik, serta strategi komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Internal dan Eksternal

Perubahan perilaku dipengaruhi faktor internal (kesadaran agama, sikap, niat) dan eksternal (regulasi, komunitas, edukasi). Larangan israf dalam Al-Qur'an (7:31) relevan dengan pengendalian konsumsi energi dan rokok. Kesadaran agama menjadi

pondasi utama yang memengaruhi pola pikir dan perilaku sehari-hari. Individu yang meyakini bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah akan lebih konsisten dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Hal ini terbukti dalam penelitian Susanti & Rahman (2022) yang menunjukkan bahwa nilai religius mampu menginternalisasi sikap ekologis.

Selain faktor internal, dukungan komunitas dan regulasi memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan perubahan perilaku. Aturan formal yang disertai sanksi sosial menciptakan kontrol eksternal yang memperkuat komitmen individu. Misalnya, larangan merokok di ruang publik lebih efektif ketika didukung pengawasan komunitas.

Edukasi berkelanjutan juga sangat berpengaruh. Kampanye publik yang menyentuh aspek moral, kesehatan, dan ekonomi mampu meningkatkan kesadaran kolektif. Ketika masyarakat memahami dampak perubahan iklim dan bahaya rokok secara holistik, mereka lebih mudah menerima regulasi yang diterapkan.

Strategi Perubahan Perilaku

Pengendalian perubahan iklim dan Kawasan Tanpa Rokok sama-sama membutuhkan edukasi publik, regulasi, serta dukungan komunitas. Perbedaannya, isu iklim berhadapan dengan tantangan struktural seperti energi fosil, sementara Kawasan Tanpa Rokok lebih banyak menghadapi resistensi budaya dan industri.

Salah satu strategi penting adalah pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama dan lembaga pendidikan. Melalui dakwah, khutbah, dan pengajian, nilai-nilai ekologis dapat disampaikan secara efektif. Strategi ini lebih membumi karena menghubungkan isu lingkungan dengan ajaran agama yang sudah akrab di masyarakat.

Selain itu, strategi komunikasi publik harus menyesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat. Informasi mengenai perubahan iklim sering dianggap abstrak, sehingga perlu diterjemahkan ke dalam pesan sederhana seperti ajakan hemat energi atau penghijauan lingkungan. Sedangkan isu Kawasan Tanpa Rokok bisa disampaikan dengan narasi perlindungan keluarga dari bahaya asap rokok.

Strategi lain adalah integrasi kebijakan lingkungan dengan kebijakan kesehatan. Misalnya, pengendalian emisi karbon dapat dipadukan dengan program kesehatan masyarakat yang mendorong pengurangan konsumsi rokok. Dengan integrasi ini, masyarakat melihat adanya manfaat ganda: kesehatan pribadi terjaga, sekaligus berkontribusi pada kelestarian lingkungan.

Studi Kasus Indonesia

Pesantren. Kampanye lingkungan berbasis nilai agama meningkatkan kesadaran santri (Syafitri et al., 2021). Program penghijauan, pengelolaan sampah, dan hemat energi menjadi bagian dari praktik pendidikan sehari-hari. Nilai religius yang dikaitkan dengan perintah menjaga ciptaan Allah membuat santri lebih mudah memahami urgensi aksi ekologis.

Lebih dari itu, pesantren berpotensi menjadi model pendidikan lingkungan yang replikatif. Dengan jumlah pesantren yang sangat banyak di Indonesia, pendekatan berbasis nilai agama dapat menyebar luas ke berbagai komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat transformasi sosial-ekologis.

Kampus Muhammadiyah. Analisis prospektif menunjukkan bahwa dukungan komunitas efektif dalam membangun Kawasan Tanpa Rokok (Nur Aini et al., 2024). Program ini berhasil karena adanya kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan organisasi kemahasiswaan yang sama-sama berkomitmen menjaga lingkungan sehat.

Selain menciptakan lingkungan bebas asap rokok, kampus Muhammadiyah juga menumbuhkan budaya baru yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari ibadah. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi perubahan perilaku berbasis agama dapat berfungsi ganda: membangun kesadaran ekologis sekaligus membentuk etika kesehatan kolektif.

Nilai Keagamaan Sebagai Legitimasi

Fatwa MUI No. 86/2023 memperkuat kebijakan publik dengan legitimasi moral. Dengan dasar agama, regulasi lebih mudah diterima masyarakat. Legitimasi

agama menambah dimensi spiritual pada kebijakan lingkungan. Fatwa tersebut tidak hanya melarang kerusakan lingkungan, tetapi juga menegaskan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, masyarakat merasa terdorong bukan semata-mata karena kewajiban hukum, melainkan juga karena dorongan iman.

Selain itu, nilai keagamaan mampu menciptakan norma sosial baru yang lebih kuat dibandingkan aturan administratif. Misalnya, masyarakat lebih patuh terhadap aturan larangan merokok di masjid karena hal itu dianggap tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menghina kesucian tempat ibadah. Norma semacam ini memperkuat efektivitas kebijakan.

Dalam konteks perubahan iklim, nilai agama juga berfungsi sebagai motivasi jangka panjang. Ketika manusia menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah, maka perubahan perilaku tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi berkembang menjadi komitmen spiritual yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, nilai keagamaan juga berperan sebagai jembatan antara sains dan spiritualitas. Banyak masyarakat yang sulit memahami bahasa teknis perubahan iklim, tetapi lebih mudah menerima pesan religius tentang amanah menjaga bumi. Dengan mengaitkan data ilmiah dengan prinsip keagamaan, komunikasi kebijakan menjadi lebih inklusif dan dapat diterima lintas kelompok sosial. Hal ini menjadikan fatwa keagamaan bukan hanya instrumen moral, melainkan juga sarana efektif untuk menjembatani ilmu pengetahuan modern dengan nilai tradisional masyarakat.

Implikasi Kebijakan

Penelitian Riska, Aini, & Renjaan (2024) tentang pajak emisi pada industri perhotelan menunjukkan pentingnya instrumen ekonomi sebagai pelengkap fatwa agama. Dengan demikian, kolaborasi pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat menjadi kunci. Selain instrumen ekonomi, kebijakan publik juga perlu memperkuat dimensi edukasi berbasis agama. Materi tentang etika lingkungan dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, khutbah Jumat, serta program dakwah. Dengan strategi

ini, kebijakan formal memperoleh dukungan moral, sedangkan masyarakat mendapatkan landasan spiritual untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.

Lebih dari itu, implikasi kebijakan juga mencakup perlunya integrasi program pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan berbasis komunitas keagamaan. Pemerintah dapat menggandeng pesantren, kampus Islam, serta ormas keagamaan untuk mengarusutamakan isu perubahan iklim dan Kawasan Tanpa Rokok dalam aktivitas dakwah maupun kegiatan sosial. Dengan cara ini, kebijakan lingkungan tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi formal, tetapi juga menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat sehari-hari.

KESIMPULAN

Integrasi nilai keagamaan dalam pengendalian perubahan iklim dan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok terbukti menjadi landasan moral yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Fatwa MUI No. 86/2023 memberikan legitimasi etis atas kebijakan publik, sedangkan studi kasus di pesantren dan kampus membuktikan efektivitas pendekatan komunitas berbasis agama. Implikasi praktis dari kajian ini menekankan pentingnya pendidikan lingkungan dalam kurikulum keagamaan, penguatan regulasi berbasis etika Islam, serta kolaborasi multi-sektor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi model kolaborasi yang lebih aplikatif dalam konteks lokal, sehingga keberlanjutan lingkungan dapat tercapai seiring dengan terjaganya kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-A'raf [7]: 31, 56; Surah Ar-Rum [30]: 41.

- Al-Qurthubi. (2006). *Tafsir Al-Qurthubi* (Vol. 7). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bukhari, I., & Muslim, I. (n.d.). *Shahih Bukhari dan Shahih Muslim*.
- Fitriani, N., et al. (2020). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 112–120.
- MUI. (2023). Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim. Majelis Ulama Indonesia.
- Nur Aini, N., et al. (2024). Prospective analysis on communal based development of non-smoking area in a Muhammadiyah campus. *Journal of Environmental Studies*, 12(1), 45–57.
- Riska, T. G., Aini, N., & Renjaan, I. P. (2024). Estimation of emission tax value of hospitality and restaurant industry in Bogor City, West Java, Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Policy*, 19(3), 225–240.
- Susanti, R., & Rahman, M. (2022). Peran tokoh agama dalam edukasi lingkungan. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 8(2), 134–148.
- Syafitri, A., et al. (2021). Kampanye lingkungan berbasis komunitas di pesantren. *Jurnal Pendidikan dan Lingkungan*, 7(1), 66–78.
- WHO. (2021). *WHO Framework Convention on Tobacco Control*. World Health Organization.